

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MITIGASI BENCANA DI GAMPONG ULEE LHEUE

Ade Faried

Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
E-mail: 210802126@student.ar-raniry.ac.id

Sazarwan Mukhra

Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
E-mail: 210802099@student.ar-raniry.ac.id

Cut Raihan Kemalasari

Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
E-mail: 210802086@student.ar-raniry.ac.id

Muhammad Shihab

Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
E-mail: 210802153@student.ar-raniry.ac.id

Lailatul Hasanah

Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
E-mail: 220802006@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

The Indian Ocean earthquake and tsunami of 2004, and particularly in Aceh, highlighted the high vulnerability of coastal communities to natural disasters. This study aims to analyze the effectiveness of Village Funds in developing disaster mitigation infrastructure and its impact on improving community welfare in Gampong Ulee Lheue, Banda Aceh. A descriptive qualitative approach is adopted, employing data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation. Data are analyzed through an interactive model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the Gampong Ulee Lheue government has integrated disaster mitigation aspects into village infrastructure development, such as the construction of sea walls, evacuation routes, and disaster information boards. Village Funds have been allocated effectively with active community participation in planning and supervision. Positive impacts can be seen in increased awareness of disaster preparedness, as well as an increased sense of security and community welfare. The uniqueness of this study lies in its focus on evaluating the implementation of Village Funds for the development of disaster mitigation infrastructure in post-tsunami coastal areas a topic that has not received adequate attention. This study highlights the strategic role of village governments in managing Village Funds to build sustainable, resilient communities.

Keywords: *Disaster Mitigation, Village Fund, Infrastructure Development, Community Resilience, Coastal Communities*

A. Introductions

Pada tahun 2004 gempa dan tsunami yang terjadi di Samudra Hindia melanda Aceh, Indonesia (Harnantyari et al., 2020; Joseph et al., 2024; Marzaniar et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir pantai rentan terhadap terkena bahaya bencana alam. Hal ini mengidentifikasi bahwa bencana alam mungkin akan terjadi lagi dan perlu dilakukan upaya pembangunan infrastruktur untuk melakukan evakuasi warga pesisir agar terhindar dari bencana alam. Desa adalah sebuah entitas hukum yang memiliki wilayah terbatas dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Khairani & Yulistiyono, 2023). Mitigasi bencana perlu dimasukkan sebagai salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terkena bencana alam (Afrian, 2021; IMRAN & PULUHULAWA, 2022; Pangestu & Fedryansyah, 2023).

Kemudian dalam proses pembangunannya, perlu dilakukan analisis ancaman, Kerentanan dan risiko yang mungkin akan terjadi. Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi dampak korban jiwa yang akan terjadi, Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Jumlah korban yang meninggal dari bencana alam Tsunami mencapai 227.898 Jiwa. Hal ini menjelaskan pada saat terjadi tsunami masyarakat sekitar tidak diberikan peringatan dini bahwa akan terjadi tsunami. Mitigasi bencana perlu dilakukan terutama untuk daerah pesisir yang rawan terjadi Tsunami agar mampu mengurangi korban jiwa. Pada prosesnya pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana meliputi, pembangunan jalur evakuasi, pembangunan sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat dan pembangunan gedung evakuasi (Aulia Mutiara Hatia Putri, 2023).

GRAFIK 1.1 KORBAN JIWA DARI BENCANA TSUNAMI

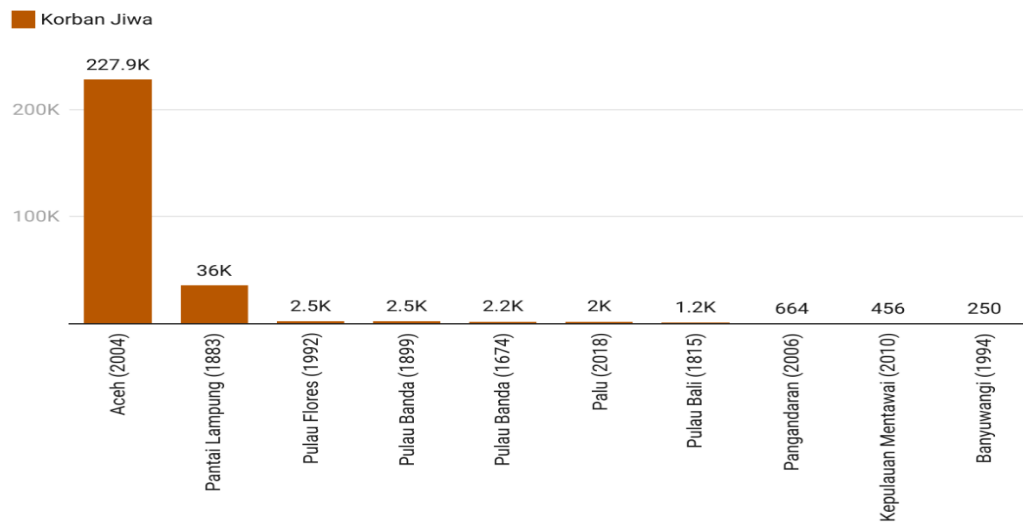


Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: BMKG • Created with Datawrapper

Sumber : BMKG, 2023.

Dalam hal ini kewenangan desa, sebagaimana diatur dalam UU/6/2014 tentang Desa, adalah hak istimewa yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengelola berbagai aspek kehidupan di wilayahnya. Ini termasuk hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah yang lebih tinggi, dan kewenangan lain yang sesuai dengan perkembangan desa.

Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, memungkinkan mereka mengelola urusan lokal dengan efisien, serta menciptakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik desa dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam mengelola dana desa, kewenangan desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi desa, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan dukungan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

penduduknya, dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu alat hubungan keuangan yang penting dalam upaya tersebut (Amin, 2022).

Peran perangkat desa atau pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desa diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia, termasuk UU/6/2014 Tentang Desa dan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU/6/2014 tentang Desa. Memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pengadaan kebutuhan mendasar di masyarakat desa, pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah desa memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Mereka merencanakan proyek dengan seksama, memastikan pelaksanaannya yang baik, dan melakukan pengawasan untuk mencegah penyelewengan dana serta memastikan hasil akhir sesuai dengan rencana. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah desa dapat memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa (Mardi Liunsanda, 2014).

Dalam hal ini penggunaan dana desa dapat digunakan dalam proyek-proyek mitigasi bencana termasuk proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan infrastruktur di daerah pesisir. Dana desa merupakan sumber dana yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek-proyek yang bersifat preventif terhadap bencana alam. Alokasi Dana desa yang diterima oleh Gampong Ulee Lheue sebesar Rp. 640.797.000 tahun anggaran 2022 (Perwal Kota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021, 2022).

Maka dari itu pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa, termasuk infrastruktur, harus berjalan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang

berlaku. Proses perencanaan, alokasi dana, dan pelaksanaan proyek harus memenuhi ketentuan hukum, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Menurut (Marzaniar & Subarsono, 2023) keterlibatan banyak aktor penting diprioritaskan dalam segala bentuk kebijakan untuk memastikan kerja sama dan tingkat keberhasilan kebijakan. Kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penting untuk memastikan keberhasilan proyek mitigasi bencana di daerah pesisir. Masyarakat juga aktif mengidentifikasi proyek-proyek ini sebagai prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam prosesnya, warga desa diberdayakan dengan pengetahuan dasar tentang manajemen proyek dan keuangan, yang memberikan manfaat baik dalam bentuk peluang kerja terkait dengan proyek maupun dengan peningkatan infrastruktur. Salah satu contoh proyek yang diwujudkan adalah escape building yang berfungsi sebagai pusat evakuasi bagi masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di sepanjang garis pantai, untuk mengurangi risiko bencana tsunami dan menjaga keselamatan penduduk. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan seperti ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penguatan infrastruktur yang berdampak positif bagi mereka (Priyanda & Ubaidullah, 2020).

Salah satu daerah di provinsi Aceh yang terdampak Tsunami adalah Gampong Ulee Lheue yang terletak disebelah utara Dengan jumlah penduduk sebanyak 704 jiwa yang terdiri dari laki-laki 350 jiwa dan perempuan 354 jiwa. Gampong Ulee Lheue terletak di ujung daerah perkotaan dan berada di pesisir pantai. Sebagai desa yang berada di pesisir pantai dan pernah terdampak tsunami

pada tahun 2004 perlu adanya mitigasi bencana, untuk mencegah banyaknya korban jiwa.

Efektivitas penggunaan dana desa untuk Gampong Ulee Lheue yang digunakan untuk mitigasi bencana mencakup berbagai isu yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus utama. Namun sudah 19 Tahun berlalu sejak Tsunami pada tahun 2004 membuat kurangnya perhatian terhadap alokasi dana untuk proyek-proyek mitigasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa mungkin belum optimal, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian proyek-proyek mitigasi dengan kebutuhan dan harapan komunitas. (Raharjo, Taufik, Agus Sunarya Sulaeman, 2018)

Salah satunya proyek yang pernah di bangun yaitu *Escape building* atau gedung evakuasi tsunami untuk mengurangi korban jiwa dari bencana yang akan terjadi serta menjadi tempat penampungan sementara. *Escape building* yang ada di kota Banda Aceh di bangun di daerah sepanjang garis pantai agar memudahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi apabila terjadi bencana alam sewaktu-waktu (AusAID, 2008). Namun mengenai pemeliharaan jangka panjang dari infrastruktur mitigasi bencana yang dibangun dengan dana desa juga menjadi problematisasi, karena pemeliharaan yang kurang memadai dapat mengurangi efektivitas proyek.

Maka dari itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan dana *Gampong Ulee Lheue* untuk mitigasi bencana dengan memperhatikan isu-isu tersebut guna meningkatkan hasil dan kesiapsiagaan komunitas terhadap bencana. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur sangat penting untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dan efektif dalam mitigasi bencana. Namun,

pemeliharaan dapat menjadi tantangan karena kurangnya sumber daya, pendanaan, dan keahlian. Hal ini dapat menyebabkan infrastruktur menjadi kurang efektif seiring berjalannya waktu, dan hal ini dapat menjadi masalah khususnya jika terjadi bencana (Iswanto et al., 2022).

Penelitian ini mencoba menggambarkan efektivitas penggunaan dana desa di Gampong Ulee Lheue untuk tujuan pembangunan Infrastruktur mitigasi bencana. Efektivitas mengukur sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. Dengan melihat Implementasi Kebijakan Program yang dibuat serta Faktor-faktor seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek mitigasi perlu dievaluasi untuk menilai tingkat implementasi yang efektif.

Indikator yang digunakan untuk penelitian ini yaitu efektivitas dana desa, implementasi kebijakan program, efisiensi penggunaan sumber daya dan tujuan pembangunan yang berkaitan dengan sejauh mana pembangunan infrastruktur mitigasi bencana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini mungkin termasuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, mengurangi resiko korban jiwa, dan meminimalisir dampak bencana (Nanda, 2022).

Dalam hal ini efektivitas merupakan sebuah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal (Kawowode et al., 2018). Oleh karena itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemanfaatan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah harus efektif agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai dengan baik. Oleh karena itu untuk menetapkan efisiensi yang tepat maka diperlukan adanya implementasi kebijakan.

Menurut Situmorang Chazali Bahwa Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari banyaknya tahapan kebijakan publik, sekaligus menjadi hal yang

penting dan memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu kebijakan yang disusun (Amanda, 2019). Dalam prosesnya kebijakan yang telah dibuat harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya harus efisien. Kemudian efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan dari faktor *output* dan *input* yang dimana dalam menjalankan sesuatu secara efisien dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan pengeluaran biaya.

Dalam hal ini, efisiensi penggunaan sumber daya harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan waktu yang ada, yang dimana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan maka tujuan pembangunan perlu dibuat terlebih dahulu sebelum menjalankan proses pengerjaan.

Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana menjadi hal yang penting, dikarenakan hal ini adalah langkah kunci untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengacu pada indikator implementasi kebijakan program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan memahami hal ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki efektivitas penggunaan dana desa dalam mitigasi bencana.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui sejauh mana efisien penggunaan dana desa. Sumber data diperoleh melalui data primer didapatkan melalui wawancara semi terstruktur dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, kabar berita dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dalam

penelitian ini. Teknik keabsahan data berupa triangulasi. Jumlah informan terdiri dari aparatur desa, termasuk masyarakat, sekretaris desa, dan bendahara desa. Lokasi penelitian dilakukan pada *Gampong Ulee Lheue* Kec Meuraxa Kota Banda Aceh.

C. Result and discussions

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wilayah rawan bencana, khususnya daerah pesisir seperti *Gampong Ulee Lheue*, adalah bagaimana membangun ketangguhan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang tepat. Dalam konteks ini, Dana Desa memegang peranan strategis sebagai instrumen pendanaan pembangunan di tingkat lokal. Pemanfaatan Dana Desa tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi bencana yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana efektivitas Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pembahasan berikut akan menguraikan efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di *Gampong Ulee Lheue*.

1. Efektifitas Dana desa dalam pembangunan insfrastruktur mitigasi bencana

Efektivitas dalam penggunaan dana desa di *Gampong Ulee Lheue* Kota Banda Aceh menjadi tolak ukuran dalam penggunaan anggaran dana desa. Pada tahun 2023 anggaran pendapatan dana desa di *Gampong Ulee Lheue* sebesar Rp. 1.416.553.866,68. Pemanfaatan dana desa menjadi pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program kegiatan di *Gampong Ulee Lheue* difokuskan pada pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan kesehatan. Kemiskinan dan ketimpangan ini sudah

terjadi sebelum Aceh menjadi daerah otonom, bahkan ketimpangan nyata terlihat di tingkat desa (Marzaniar et al., 2024). Pada program pembangunan fisik infrastruktur mitigasi bencana saat ini tidak ada dilakukan. Yang dimana sebelumnya pada pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di *Gampong Ulee Lheue* dibangun oleh pihak eksternal dan perawatan infrastruktur juga dilakukan oleh pihak eksternal. Dana desa yang ada saat ini sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut dalam pengalokasian dana desa.

Tabel 1.1 Anggaran Pemasukan dan Belanja Gampong Ulee Lheue Tahun 2023

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp. 602.808.711
2	Bidang Pelaksanaan pembangunan Gampong	Rp. 386.046.400
3	Bidang pembinaan masyarakat gampong	Rp. 153.769.156,68
4	Bidang pemberdayaan masyarakat gampong	Rp. 166.200.500
5	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 172.316.169
Total Pengeluaran		Rp. 1.481.140.936,68
Total Pendapatan Desa		Rp. 1.416.553.866,68
Surplus / Defisit		Rp. -64.587.070,00

Sumber : Dokumen APBG Gampong Ulee Lheue (2023)

Anggaran dana desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pembangunan desa. Prioritas dalam pemakaian anggaran dana desa di atur dalam Peraturan Pemerintah PP/60/2012 dan Peraturan Pemerintah PP/22/2015. Pemanfaatan dana desa sebagai optimalisasi untuk mendukung sumber daya pembangunan. Pemerintah desa menetapkan prioritas pada inisiatif-inisiatif yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama, dengan upaya meningkatkan program bantuan yang diberikan

untuk masyarakat *Gampong* Ulee Lheue seperti BLT dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di *Gampong* tersebut. Selain itu pemerintah *Gampong* Ulee Lheue juga aktif dalam mendukung program ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini layanan kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam proses pembangunan non fisik seperti halnya mengatasi stunting,

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas yang di sebutkan oleh Amin Tunggul Widjaya (1993) menjelaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah desa *Gampong* Ulee Lheue mengarahkan dan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa yang efektif dalam menunjang pembangunan desa menuju arah yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat .

a. Implementasi Program Pembangunan Mitigasi Bencana di Ulee Lhee

Dalam upaya memahami secara komprehensif pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana di wilayah pesisir, diperlukan pembahasan yang terarah mengenai implementasi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Subbab berikut akan menguraikan secara rinci pelaksanaan program mitigasi bencana di Ulee Lhee sebagai salah satu kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana alam.

Gambar. 1 Proyek Mitigasi Bencana Tembok Penahan Ombak



Sumber : Personal dokumentasi, 2023.

Dalam hasil temuan terutama dalam proses implementasi kebijakan di *Gampong Ulee Lheue* aparat desa melakukan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menerima aspirasi masyarakat mengenai hal yang dibutuhkan. Dalam prosesnya musrenbang dimulai dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu. Dalam pertemuan ini masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya aspirasi masyarakat yang sudah dikumpulkan akan dilakukan analisis dan pemilihan prioritas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2023 untuk proyek pembangunan mitigasi bencana tidak dilakukan dikarenakan hal itu masih belum menjadi urgensi. Yang dimana dalam prosesnya proyek-proyek yang diprioritaskan dalam prosesnya yaitu untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi terdapat kendala setelah implementasi dilakukan, dalam prosesnya terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur umum masyarakat tidak dilibatkan hal ini dibuktikan oleh keterangan sekdes dan masyarakat. Dikarenakan untuk proses pembangunan pihak yang bertanggung jawab yaitu pihak yang berada di lapangan.

Dalam tujuan sebenarnya pemberdayaan masyarakat dilibatkan namun pada saat ini dalam proses pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan dan menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan kurangnya SDM dan aset yang dimiliki *gampong* seperti tanah yang tidak tersedia. Berdasarkan keterangan sekdes, kantor keuchik yang ditempati saat ini bukan merupakan milik *Gampong* Ulee Lheue melainkan hibah dari Masjid Baiturrahman Ulee Lheue. Pada proses implementasi kebijakan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu agar partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadi aktif. Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana pemerintah desa bekerjasama dengan pihak eksternal *Gampong* dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana (Ratna Dewi, 2019).

Oleh karena itu, kesimpulan yang dibuat dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III (Grindle, 2017), bahwa proses implementasi kebijakan menjadi tahap dalam pembentukan kebijakan dan konsekuensi yang mungkin terjadi bagi masyarakat yang dipengaruhi. Dalam hal ini implementasi kebijakan di *Gampong* Ulee Lheue menjadi proses yang penting karena berpengaruh kepada elemen masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta dalam proses implementasinya harus melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dapat membawa perubahan yang baik kepada semua pihak jika dalam prosesnya saling melibatkan satu sama lain.

b. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam keberhasilan mitigasi di *Gampong* Ulee Lheue. SDM terdiri dari manusia yang dipekerjakan

dalam suatu organisasi sebagai perencana dan pelaksana untuk mencapai tujuan gampong. Ketersediaan dan kompetensi SDM sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penyelesaian pekerjaan. SDM juga melibatkan kemampuan terpadu antara daya pikir (akal budi) dan daya fisik yang dimiliki individu manusia. Dalam mitigasi bencana di Gampong Ulee Uleu, penggunaan sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting.

Dari hasil temuan terutama dalam penggunaan sumber daya manusia di Gampong Ulee Lheue, bahwa sumber daya manusia yang terjadi di Gampong Ulee Lheue masih sangat rendah dari segi manapun seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana itu sendiri oleh karena itu Pentingnya sumber daya manusia untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan gampong itu sendiri. Dengan pengelolaan SDM yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan keberhasilan gampong. Perhatian terhadap pengembangan SDM lokal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan demikian investasi dalam pengembangan SDM di Gampong Ulee Lheue dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembangunan lokal.

Oleh karena itu upaya peningkatan SDM membutuhkan kerjasama dari setiap masyarakat terutama dalam pemberian pendidikan kepada anak-anak yang masih bersekolah dan pelatihan keahlian sesuai standar kepada masyarakat dewasa. Oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat penting dalam mensukseskan program tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas diri dan daya saing masyarakat. Selain itu diperlukan juga pengawasan dan evaluasi dari setiap kegiatan untuk menjaga transparansi penggunaan dana desa dan pertanggungjawaban atas dana

yang digunakan. Program - program yang dibuat diharapkan agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM.

Selain itu dalam konteks mitigasi bencana, pembangunan SDM yang baik dapat menuju pada pengembangan manusia yang unggul dan juga memiliki korelasi yang erat terhadap pertumbuhan produktivitas kerja. Oleh karena itu pemanfaatan dana desa dalam pengembangan SDM melalui pemberdayaan masyarakat dan program-program pelatihan diharapkan agar mampu mencapai hasil yang telah ditentukan dan dapat menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan mitigasi bencana di Gampong Ulee Lheue

Berdasarkan pendapat dari (Kurniawan & Sugiri, 2021), strategi peningkatan SDM perlunya diterapkan fungsi-fungsi manajemen diantaranya planning, organizing, leading dan controlling. Dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di *Gampong Ulee Lheue* perlunya diterapkan fungsi-fungsi tersebut agar proses pekerjaan sesuai dengan target tujuan yang telah ditetapkan dan tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien dalam pengembangan SDM di *Gampong Ulee Lheue*

c. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dari hasil temuan terutama dalam Pencapaian tujuan pembangunan di Gampong Ulee Lheue terdapat hambatan yang sangat berpengaruh bagi pencapaian tujuan pembangunan di gampong itu sendiri. kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam kolaborasi dengan pihak pihak terkait, dan sumber daya manusia di gampong itu sendiri yang masih lemah dari hasil temuan di lapangan bahwa tidak adanya diadakan sosialisasi bagi masyarakat desa, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan bagi pihak pemerintah

setempat. sedangkan pencapaian tujuan pembangunan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak pihak lain. Dengan tujuan meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan kolaborasi sangat penting dalam menyusun dan melaporkan capaian pembangunan serta Pembangunan Ekonomi juga dapat menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas jika dikaitkan dengan Teori modal manusia, Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan tujuan pembangunan secara spesifik dan umum. Pencapaian tujuan pembangunan di Gampong Ulee Lheue juga membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi pariwisata dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dan teori yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian Menurutnya, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan. Program pembangunan juga merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan di dalam masyarakat secara merata untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik dalam prosesnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam pembangunan di Gampong Ulee Lheue terutama dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural

hal ini dapat menyebarluaskan nilai-nilai yang baik dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram.

D. Conclusions

Efektivitas penggunaan dana desa di *Gampong Ulee Lheue* dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan kesejahteraan masyarakat. Peran kewenangan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa dengan efektif guna mendukung pembangunan lokal. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi instrumen kunci dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, perangkat desa memegang peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penggunaan dana desa, yang dapat mencakup proyek-proyek mitigasi bencana, menjadi instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dan pemeliharaan proyek, perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas mitigasi bencana di *Gampong Ulee Lheue*. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mitigasi bencana di *Gampong Ulee Lheue*, Kota Banda Aceh. Pertama, diperlukan upaya perluasan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana dan manfaat infrastruktur mitigasi. Program penyuluhan dan edukasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, perlu

dilakukan evaluasi berkala terhadap kondisi infrastruktur mitigasi bencana, seperti jalur evakuasi dan gedung evakuasi, serta melakukan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan kesiapan pada saat dibutuhkan. Ketiga, peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa menjadi krusial, dengan mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pengelola dana desa. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen dana desa, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan koordinasi antarlembaga terkait. Terakhir, perlu mengintegrasikan mitigasi bencana secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan desa dengan keputusan terkait infrastruktur didasarkan pada analisis risiko yang cermat melibatkan ahli mitigasi bencana dan pemangku kepentingan terkait. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penguatan ketahanan bencana di tingkat desa.

Reference

- Afriani, R. (2021). Kajian Mitigasi Terhadap Penyebab Bencana Banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa. *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(2). <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i2.1660>
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalist: Social and Government*, 1, 34–38.
- Amin, H. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong. *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 71–76. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.42>
- Aulia Mutiara Hatia Putri. (2023). 10 Tsunami Terbesar di RI, Korban Jiwa Hingga Ratusan Ribu. *CNN*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230426074723-128-432271/10-tsunami-terbesar-di-ri-korban-jiwa-hingga-ratusan-ribu>

- AusAID. (2008). Kemitraan Australia Indonesia Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan Pemulihan Pasca Bencana di Aceh dan Nias (2005-08). www.aisaid.gov.au
- Grindle, M. S. (2017). Policy content and context in implementation. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, 3–34. <https://doi.org/10.1515/9781400886081-005>
- Harnantaryi, A. S., Takabatake, T., Esteban, M., Valenzuela, P., Nishida, Y., Shibayama, T., Achiari, H., Rusli, Marzuki, A. G., Marzuki, M. F. H., Aránguiz, R., & Kyaw, T. O. (2020). Tsunami awareness and evacuation behaviour during the 2018 Sulawesi Earthquake tsunami. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 43, 101389. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101389>
- IMRAN, S. Y., & PULUHULAWA, F. U. (2022). Mitigasi Bencana dan Pengalokasiannya Pada Dana Desa Botumoito. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.336>
- Iswanto, B., Wahid, M., & Baidawi, A. (2022). ... Dana Desa Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bencana Alam Karhutla Di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus di Desa Arang-Arang). [https://repository.unja.ac.id/33466/13/SKRIPSI BAMBANG ISWANTO-H1A118043.pdf](https://repository.unja.ac.id/33466/13/SKRIPSI%20BAMBANG%20ISWANTO-H1A118043.pdf)
- Joseph, J. K., Akhildev, K., Renjith, V. R., & Pradeepkumar, A. P. (2024). Eco-DRR practices and research: Visualization and analysis of global perspectives. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 102, 104271. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104271>
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).

- Khairani, W., & Yulistiyono, H. (2023). Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Lokal. In *Buletin Ekonomika Pembangunan*. <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20036>
- Kurniawan, A., & Sugiri, D. (2021). Kepuasan Pengguna Layanan Publik Pada Unit Kerja Badan Layanan Umum (Blu) Bidang Pendidikan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(1), 11–22. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.144>
- Mardi Liunsanda. (2014). Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Salience Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Marzaniar, P., Arifka, D., Syahputra, D. I., & Rahma, U. (2024). Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi : Studi Kasus Pra dan Pasca Otonomi Khusus Aceh. *Al-Ijtima'i : International Journal of Government and Social Science*, 9(2), 1–10.
- Nanda, W. (2022). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(1), 1–9.
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA ALAM BERBASIS MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG SIAGA BENCANA

Ade Faried, Sazarwan Mukhra, Cut Raihan Kemalasari, Muhammad Shihab, & Lailatul Hasanah

DI DESA CIHANJUANG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN
SUMEDANG. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 6(1).

<https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.47267>

Perwal Kota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2022. (2022).

Priyanda, & Ubaidullah. (2020). Efektivitas penggunaan dana desa di gampong
lueng bata kota banda aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 5(1), 1–10.

Raharjo, Taufik, Agus Sunarya Sulaeman, S. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana
Desa Taufik. 1, 1–2.

Ratna Dewi. (2019). Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan
Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Journal
Penggunaan Dana Desa, 224(11), 122–130.